

		Akibat	1. Laporan Pertanggung Jawaban perjalanan dinas kurang tertib dan tidak wajar 2. Laporan pertanggung jawaban kurang tertib dan tidak wajar
		Reko.nendasi	1. Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pengujian dan Verifikasi bukti-bukti pertanggung jawaban perjalanan dinas dengan cermat dan teliti 2. Menginstruksikan Bendahara pengeluaran Untuk mengadministrasikan pertanggungjawaban keuangan dengan tertib dan sesuai aturan
		Tanggapan	- Sudah menginstruksikan kepada Bendahara Pengeluaran agar menyetor pajak sesuai peraturan dan melengkapi kekurangan sebagai dokumen pendukung. - Melampirkan bukti-bukti transaksi pengeluaran. - Membuat pertanggung jawaban perjalanan dinas dengan rinci - Bendahara Pengeluaran agar lebih teliti dan tegas
	2	Kondisi	Terdapat Kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas RRI Jayapura sebesar Rp. 2.299.000,- (Lampiran 1)
		Kriteria	a. PMK No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas PNS dan Pegawai Tidak tetap b. PER-3/PB/2014 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satker Pengelolaan APBN. c. PMK No. 49/PMK .05/2017 tentang SBM tahun 2018
		Sebab	Kelalaian pejabat terkait dan Bendara Pengeluaran
		Akibat	Terjadi Kerugian Negara Sebesar Rp. 2.299.000,-
		Rekomendasi	Menginstruksikan Bendahara pengeluaran untuk menarik TGR ke Pegawai yang bersangkutan serta menyetor ke kas negara dan photocopy bukti setor diserahkan ke SPI LPP RRI
		Tanggapan	Menginstruksikan kepada Bendahara Pengeluaran agar menarik kelebihan biaya perjalanan dinas pejabat terkait dan menyetornya ke Kas Negara. Bukti setor dilampirkan
	3	Kondisi	Terdapat Pertanggungjawaban Belanja Barang di RRI Jayapura Periode Oktober s.d Desember 2017 sebesar Rp. 296.947.208,- (Lampiran 2), Periode Januari s.d Juli 2018 sebesar Rp. 285.443.958,- Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan belum ada Bukti Pembelian Belanja Barang tersebut berupa Nota pembelian dan kuitansi (Lampiran 2)
		Kriteria	PMK.No.190/PMK.02/2012 Pasal 24 ayat 2 dan 4.
		Sebab	Kelalaian pejabat terkait dan Bendara Pengeluaran
		Akibat	Pengeluaran Belanja di RRI Jayapura tersebut tidak diyakini kebenarannya
		Rekomendasi	Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Terkait agar mempertanggung jawabkan Bukti Pembelian Belanja Barang dan apabila tidak dapat mempertanggung jawabkan agar mengembalikan ke kas negara dan photocopy bukti setor diserahkan ke SPI LPP RRI
		Tanggapan	- Sudah menginstruksikan kepada Bendahara Pengeluaran dan Pejabat terkait agar membuat bukti-bukti pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya - Melampirkan bukti-bukti transaksi pengeluaran sebagai dokumen pendukung - Bendahara Agar melaksanakan pertanggung jawaban keuangan yang dikelolanya dengan lebih teliti
	4	Kondisi	Terdapat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pegawai RRI Jayapura sebesar Rp. 127.331.200,- Periode Oktober s.d. Desember 2017 Tahun 2017 dan sebesar Rp. 78.402.500,- Januari - Juli 2018 (Lampiran 3) sampai dengan berakhirnya Pemeriksaan belum dilengkapi Bukti-bukti berupa kuitansi, Pengeluaran Rill SPD Rampung (Rincian Perjalanan Dinas), Tiket Bill Hotel Tidak ada
		Kriteria	PMK.113/PMK.05/2012 tentang petunjuk Perjalanan Dinas PNS dan Pegawai Tidak Tetap.
		Sebab	Kelalaian Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Terkait
		Akibat	Bukti Pertanggungjawaban tidak diyakini kewajarannya
		Rekomendasi	Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Terkait agar mempertanggung jawabkan bukti Pengeluaran tersebut dan apabila tidak dapat mempertanggung jawabkan agar mengembalikan ke kas negara dan photocopy bukti setor dikirim ke SPI LPP RRI
		Tanggapan	Sudah kami menginstruksikan kepada Bendahara Pengeluaran dan Pejabat terkait agar melengkapi bukti-bukti transaksi pengeluaran perjalanan dinas sebagai dokumen pendukung